

JURNAL



PERAN SEKOLAH DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM HIDAYATULLAH SEMARANG

Oleh:

Nama : Rayi Mutia A

NIM : D2B008116

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The school is one place to acquire science education, and special skills. In a joint life of the nation, political knowledge is absolutely necessary. Given fungsi school as the main educational institutions, political education should also be performed at the level of basic education to middle to provide sufficient political knowledge for students, giving rise to a patriotic attitude, love of the homeland, tolerance, and the nationalist spirit. In this study, researchers conducted research at Hidayatullah Islamic Senior High School of Semarang. reasons for choosing this school is based on Islamic religious schools will usually have hours of lessons associated with less religious are more than public schools. We aimed to determine how the value of political-use values are closely related to religious values.

Issues to be addressed is how the role of the school in political education for students. The research method chosen this time is qualitative-descriptive type to illustrate how the role of the school in the political education of their students.

From the research, it is known that political education at Hidayatullah Islamic Senior High School of Semarang more done by coaching character or in other words is character that is supported by the enrichment of religious practices such as prayer in congregation, dhikr, mentoring, and the Koran. Subjects that have the elements of Political Education Subjects include Civics, History, Islamic Education, Sociology, and Indonesian. Political education is also done through extracurricular activities and intra followed students as student council, MPK, Scouts, and Paskibra.

Recommendations can be given by the researchers in this study is to increase the role of teachers in improving student understanding in politics. Teachers must be able to facilitate the students for discussion, role playing, demonstrating an election, political debate and so that learning becomes interesting, creative, innovative and effective. In addition, there should be a method or strategy in classifying students in the organization in accordance with the interests and talents of each.

Keywords: Role of the School, Political Education, Students

A. PENDAHULUAN

Sosialisasi politik adalah proses di mana seseorang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Proses tersebut hakikatnya merupakan upaya mempelajari nilai-nilai atau budaya politik masyarakat. Sosialisasi politik pada dasarnya adalah proses belajar, baik dari pengalaman maupun pola-pola tindakan. Sosialisasi politik memberikan indikasi umum hasil belajar tingkahlaku politik dan kelompok berkenaan dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap politik tertentu. Proses sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Gabriel A. Almond menjelaskan proses sosialisasi yaitu proses “pengajaran” nilai-nilai masyarakat, dalam hal ini nilai-nilai dan kebudayaan politik kepada warganegara. Ada dua hal yang penting dan menarik mengenai proses ini, pertama, sosialisasi politik bisa langsung melalui pendidikan, dan yang kedua adalah melalui proses tidak langsung yang disebabkan latar belakang kehidupan seseorang.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab, ini merupakan salah satu dasar dan tujuan dari pendidikan nasional yang seharusnya menjadi acuan bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi telah mengakibatkan kaburnya batas-batas antar negara (baik secara politik, ekonomi, maupun sosial), masalah nasionalisme tidak lagi dapat dilihat sebagai masalah sederhana yang dapat dilihat dari satu perspektif saja, sehingga sikap nasionalisme perlu dipupuk sejak dini agar tercipta generasi muda yang memiliki sifat cinta tanah air dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Sehubungan dengan globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi telah mengakibatkan kaburnya batas-batas antar negara (baik secara politik, ekonomi, maupun sosial), masalah nasionalisme tidak lagi dapat dilihat sebagai masalah sederhana yang dapat dilihat dari satu perspektif saja, sehingga sikap nasionalisme perlu dipupuk sejak dini agar tercipta generasi muda yang memiliki sifat cinta tanah air dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat dibangun dan ditumbuhkan dengan cara memberikan pemahaman tentang simbol-simbol seperti lambang negara, bendera nasional, bahasa nasional serta lagu

kebangsaan. Sekolah juga mengajarkan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan politik, dimana anak diajarkan mengenali nilai, norma, serta atribut politik di sekolah.

Tujuan pendidikan politik adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, anti-korupsi, serta membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Tujuan pendidikan politik adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, anti-korupsi, serta membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

Pendidikan Agama dalam ruang publik sekolah resmi hadir sejak 29 Desember 1945 ketika Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan yang berhasil merumuskan sistematika dan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menggantikan Sekolah Menengah yang diciptakan Jepang. Pada saat itu pendidikan agama telah masuk dalam kurikulum SMP meskipun sebelumnya Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan telah menyampaikan sikapnya yang sangat pesimis dengan mengatakan, “Agama dalam pengajaran di sekolah adalah soal lama dan terus menerus menjadi persoalan yang sulit”. Kesulitan ini terutama karena bagi Ki Hajar ada tuntutan supaya sifat keagamaan tadi diberi bentuk yaitu ‘pengajaran agama’, yang mana hakikat syariat agama diberi bentuk yang pasti dan tertentu. Berbeda dengan sekolah berbasis agama, katakanlah sekolah yang berada dibawah naungan yayasan Islam atau Madrasah. Sekolah berbasis Agama Islam menerapkan perpaduan antara standar kurikulum Diknas dan standar kurikulum Depag. Jadi secara praktiknya, akan lebih banyak muatan agama dalam pendidikan berbasis keagamaan.

Adapun contoh dari sekolah yang mempunyai nilai tambahan di dalam pendidikan keagamaan yaitu SMA Islam Hidayatullah Semarang. Sekolah ini cukup ternama di Semarang mengingat lokasinya yang berada di lingkungan perkotaan dan memiliki reputasi lulusan yang baik. SMA Islam Hidayatullah Semarang mengkombinasikan pendidikan antara ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Dengan demikian dua sisi kebutuhan dasar hidup manusia, kebutuhan material dan spiritual dapat dikembangkan secara

harmonis. Dalam SMA Hidayatullah diajarkan pula Bahasa Arab sebagai mata pelajaran sehingga peserta didik dapat memahami isi dari Al Quran dan Hadist secara lebih mendalam. Anak-anak dengan demikian dapat memperoleh kebebasan berfikir dalam memahami agama (Mitsuo Nakamura yang dikutip dalam Sodiq A. Kuntoro, 2006:139).

Sebagai salah satu sekolah dengan basis Agama Islam, SMA Islam Hidayatullah Semarang juga memiliki metode pendidikan yang sedikit berbeda dengan SMA umum lainnya. SMA ini memiliki metode pengajaran yang lebih Islami diantaranya kewajiban bagi seluruh siswa untuk menutup aurat, melakukan kegiatan-kegiatan rutin keagamaan, dan memperbanyak materi-materi pendidikan yang berkaitan dengan Agama Islam yang dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal.

Dari latar belakang dan alasan-alasan di atas, peneliti memutuskan untuk memfokuskan penelitian ini di sekolah islam Hidayatullah Semarang. Selain itu penelitian ini juga akan berusaha menjawab faktor-faktor apa yang mendukung adanya pendidikan politik di sekolah berbasis keagamaan.

B. Pembahasan

1. Peran sekolah dalam pendidikan politik di SMA Islam Hidayatullah Semarang

a. Proses Belajar Mengajar

Sekolah yang berbasis keagamaan umumnya memiliki beberapa perbedaan dengan sekolah-sekolah umum seperti halnya SMA Hidayatullah ini. Sekolah yang berbasis keagamaan umumnya memiliki jam pelajaran ataupun kegiatan keagamaan yang lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah umum.

Jika di sekolah umum biasanya hanya terdapat satu mata pelajaran wajib untuk memperdalam pengetahuan agama, sekolah yang berbasis agama khususnya Agama Islam memiliki tambahan mata pelajaran lain yang sifatnya adalah mata pelajaran Muatan Lokal. Mata Pelajaran Muatan Lokal yang bersifat keagamaan di SMA Islam Hidayatullah Semarang diantaranya adalah:

1. Bahasa Arab (mengingat bahasa pengantar dalam Al Qur'an adalah Bahasa Arab);
2. Fiqhul Islam;
3. Sejarah Kebudayaan Islam;
4. Al Quran Hadist;
5. Aqidah Akhlak;
6. Baca Tulis Al Quran

Tabel 1
Rekapitulasi Jam Pelajaran Mata Pelajaran yang Bersifat Keagamaan di SMA
Islam Hidayatullah Semarang Tahun Ajaran 2013/2014

Mata Pelajaran	Kelas											
	X				XI				XII			
	1	2	3	4	IA1	IA2	IS1	IS2	IA1	IA2	IS1	IS2
Bahasa Arab	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aqidah Akhlak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fiqhul Islam	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Al Quran Hadist	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
SKI ¹	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Baca Tulis Al Qur'an	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3
Jumlah	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	7	7
	20%				20%				14%			

Dari paparan tabel diatas, masing-masing tingkatan kelas memiliki porsi mata pelajaran dengan muatan pendidikan agama yang bervariasi. Untuk kelas X dan XI jam pelajaran yang dianggarkan untuk pendidikan agama ialah 10 jam mata pelajaran per minggu. Semua kelas memiliki jumlah jam pelajaran yang sama yakni 50 jam per minggu. Khusus untuk kelas XII pada awal semester genap akan diberlakukan adanya jam tambahan yakni jam ke-0 dari hari Senin hingga Jumat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama yang dilakukan di SMA Islam Hidayatullah mencapai 20 persen dari jumlah keseluruhan jam mata pelajaran.

Model Pendidikan Agama seperti diatas dimaksudkan untuk mengasah dan membina karakter siswa menjadi generasi *Khaira Ummah* atau umat yang baik. Ini merupakan bagian dari pendidikan politik karena dalam dunia politik dituntut pertanggungjawaban dan tanggungjawab dalam mengemban amanah jabatan yang bersifat politik maupun publik. Dengan kuatnya pendidikan agama yang diberikan selama duduk menjadi siswa diharapkan siswa akan menjadi generasi yang lebih jujur dan amanah.

Selain mata pelajaran yang bersifat keagamaan, terdapat juga beberapa mata pelajaran umum yang bermuatan nilai politik diantaranya adalah Pendidikan Kewarganegaraan, Sosiologi, Sejarah, dan Bahasa Indonesia. Rekapitulasi jam pertemuan untuk tiap kelas adalah sebagai berikut:

¹ Sejarah Kebudayaan Islam

Tabel 2
Rekapitulasi Jam Pelajaran Mata Pelajaran yang Memiliki Muatan Pendidikan Politik di SMA Islam Hidayatullah Semarang Tahun Ajaran 2013/2014

Mata Pelajaran	Kelas											
	X				XI				XII			
	1	2	3	4	IA1	IA2	IS1	IS2	IA1	IA2	IS1	IS2
Pendidikan Kewarganegaraan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sejarah	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2
Sosiologi	2	2	2	2			4	4			5	5
Bahasa Indonesia	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
Jumlah	7	7	7	7	6	6	11	11	7	7	13	13

Sumber: SMA Islam Hidayatullah Semarang, 2014

Dari tabel diatas, diketahui bahwa di kelas X mata pelajaran yang memiliki muatan pendidikan politik diajarkan selama tujuh jam perminggu atau 14 persen dari jumlah keseluruhan jam mata pelajaran. Sedangkan untuk di kelas XI juga dibedakan, dimana untuk kelas IA hanya diajarkan selama enam jam mata pelajaran (12 persen) dengan menghilangkan mata pelajaran sosiologi dan untuk kelas IS selama 11 jam mata pelajaran (22 persen). Ini disebabkan karena pada kelas XI telah dilakukan penjurusan, sehingga untuk kelas IS lebih banyak memiliki bahasan tentang politik. Sedangkan untuk kelas IA yang merupakan kelas eksak yang lebih banyak dibahas adalah mengenai ilmu-ilmu pasti seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan bahasa.

Lain halnya dengan kelas XII. Untuk jurusan IA hanya dijadwalkan sebanyak 7 jam mata pelajaran (14 persen) dan untuk kelas IS sebanyak 13 jam mata pelajaran (26 persen) dari jumlah keseluruhan mengingat masing-masing jurusan memiliki mata pelajaran yang berbeda dalam Ujian Akhir Nasional. Banyak-sedikitnya porsi ini ditentukan dari mata pelajaran apa yang akan diujikan.

Pendidikan Agama di sekolah yayasan Islam umumnya lebih menekankan kepada praktik dalam ketaatan beragama. Dilihat dari lamanya pembelajaran pendidikan Agama juga lebih lama daripada sekolah umum biasa dimana umumnya sekolah umum hanya melakukan dua hingga empat jam tatap muka perminggu untuk Pelajaran Pendidikan Agama, namun di sekolah berbasis keagamaan ini frekuensi pertemuan dalam Mata Pelajaran yang bersifat keagamaan bisa mencapai 14 (empat belas) jam pelajaran khusus untuk Pendidikan Agama beserta Pelajaran Muatan Lokal Keagamaan lain yang menyertainya.

Beberapa hal yang membedakan sekolah ini dengan sekolah-sekolah umum lainnya diantaranya ialah murid-murid yang dipisahkan untuk siswa perempuan dan siswa laki-laki

(satu kelas khusus untuk salah satu jenis kelamin saja), aturan menutup aurat bagi semua guru dan siswa, model baju yang longgar untuk semua siswa laki-laki, dan ketiadaan gambar Presiden dan Wakil Presiden di setiap kelas. Sekolah ini tetap melaksanakan upacara bendera di setiap hari Senin dan diperbolehkan untuk menghormati kepada bendera, karena bendera merupakan salah satu simbol kenegaraan.

Program umum SMA Islam Hidayatullah Semarang yaitu Materi Kurikulum sesuai Kepmendikbud No. 061/U/1993 dengan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), pengendalian pada pelajaran sains, teknologi informasi dan bahasa asing (inggris & Arab) yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berwawasan lingkungan sosial, mengarah pada pencapaian sejumlah kompetensi.

Pengembangan Kurikulum Islam Hidayatullah Semarang yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

1. Struktur Kurikulum Kelompok Mata Pelajaran

- Kelompok mata pelajaran Agama

Meliputi Aqidah akhlak, Al Quran Hadist, fiqih/PAI, sejarah kebudayaan Islam, bahasa arab. Tujuan memberikan menambah wawasan terhadap macam- macam pelajaran agama. Sehingga siswa mengerti luas tentang agama Islam. Juga dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

- Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan

Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan, termasuk wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi serta nepotisme.

- Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program Ilmu Alam memiliki mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, TIK, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sebagai materi ajar utama. Sedangkan Program Ilmu Sosial memiliki mata pelajaran Matematika, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah, TIK, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sebagai materi ajar utama.

- Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan terdiri atas mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah raga dan Kesehatan. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan di SMA Islam Hidayatullah Semarang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba, bebas asap rokok, HIV / AIDS, Demam berdarah, muntaber, dan penyakit-penyakit lain yang berpotensi untuk mewabah di masyarakat.

Pendidikan politik berfungsi sebagai *nation and character building* atau pembentukan karakter suatu bangsa, dimana pendidikan politik diharapkan dapat mewujudkan suatu negara yang demokratis yang patuh pada hukum. Adapun sebagai ciri dari sebuah negara demokratis adalah adanya kebebasan berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat sesuai dengan hati nurani. Kebebasan berpendapat ini dapat direpresentasikan pada kebebasan memilih pada penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembelajaran yang harus dilakukan sejak dini. Artinya pendidikan tersebut harus dilakukan pada anak-anak usia muda. Pendidikan politik sudah harus dilakukan di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk membentuk kesadaran warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh konstitusi. Hal itulah yang mendorong perlu dilakukan pendidikan politik di sekolah-sekolah, dimana hal ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasinya dalam membentuk pemerintahan yang baik.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan perlu dilakukan di sekolah-sekolah. Hal ini untuk memberikan pemahaman-pemahaman bagi siswa mengenai proses demokratisasi yang ada di negara ini. Hal tersebut mendukung pendapat Buchori, yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik yaitu :

1. Adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik.
2. Adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik.
3. Diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik.
4. Pentingnya pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*),

Selain menurut Kartaprawira (1988:54), pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sehingga pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah.

Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik harus berpegang teguh pada falsafah dan berprikebadian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang di laksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan berbangsa Indonesia.

Konsep pendidikan yang ada di SMA Hidayatullah, mengacu pada sistem ajaran Islam dimana sistem ajaran Islam. Sekolah yang memberikan pendidikan berbasis Islam lebih menekankan agama daripada umum, dimana siswa yang bersekolah di sekolah berbasis keagamaan juga mempunyai rasa cinta terhadap bangsa, tahu sejarah bangsa serta mempunyai rasa nasionalisme tinggi.

Pendidikan Islam yang diajarkan di SMA Hidayatullah terdiri atas tiga bagian, yaitu aqidah (keyakinan), syariah (aturan-aturan hukum tentang ibadah, dan muamalah) dan akhlak (karakter). Ketiga bagian tersebut tidak dapat dipisahkan, harus menjadi satu kesatuan yang utuh yang saling memengaruhi. Marzuki (2011:468), menyatakan bahwa aqidah merupakan pondasi yang menjadi tumpuan terwujudnya syariah dan akhlak. Syariah merupakan bentuk bangunan yang hanya bisa terwujud bila dilandasi oleh aqidah yang benar dan akan mengarah pada pencapaian akhlak (karakter) yang seutuhnya dimana akhlak merupakan hasil atau akibat dari terwujudnya bangunan syariah yang benar yang dilandasi oleh pondasi aqidah yang kokoh. Tanpa aqidah dan syariah tidak akan terwujud akhlak (karakter) yang sebenarnya.

Dalam kurikulum Mata pelajaran yang diberikan di SMA Hidayatullah juga dilakukan pendidikan politik yang diajarkan melalui materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), dimana pada mata pelajaran ini siswa akan dapat membiasakan membahas tema-tema tentang politik, baik politik nasional maupun politik lokal seperti Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Walikota Semarang. Dalam pendidikan politik di sekolah, peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran pendidikan politik. Guru dalam hal ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan wawasannya untuk mengembangkan kurikulum melalui berbagai kegiatan peningkatan profesionalisme guru, baik dalam pengembangan materi, metode, model, maupun media ajar, karena fenomena politik dan ketatanegaraan yang sangat dinamis, sehingga pembelajaran PKN harus mampu menyuguhkan sesuatu yang menarik, sehingga siswa mampu memahami dengan baik dalam pendidikan politik tersebut.

Selain itu guru juga harus dapat memfasilitasi kegiatan siswa untuk diskusi, bermain peran, mendemonstrasikan pelaksanaan pemilu, debat politik dan sebagainya agar pembelajaran menjadi menarik, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut penilaian guru yang bersangkutan, siswa cukup antusias dengan materi diskusi yang diberikan. Bahkan tidak jarang terjadi debat dan adu argumen ketika diskusi berlangsung.

2. Pendidikan Politik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler di SMA Islam Hidayatullah

Selain dilakukan melalui muatan dalam Mata Pelajaran, pendidikan politik juga dilakukan melalui beberapa proses yang menyangkut demokrasi sekolah, diantaranya ialah pemilihan anggota dan ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS) yang dilakukan oleh segenap siswa dan guru. Kegiatan ini juga bermitra dengan KPU dalam pelaksanaannya, sehingga secara langsung para siswa dapat menentukan pilihannya dengan cara yang demokratis.

Selain dari kegiatan intrakurikuler, demokratisasi dan pendidikan politik juga dapat dilakukan melalui organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan sekolah dalam rangka memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan agama serta norma-norma sosial baik lokal, nasional, maupun global untuk membentuk insan yang paripurna. Dengan kata lain, ekstrakurikuler merupakan kegiatan

pendidikan di luar jam pelajaran yang ditujukan untuk membantu perkembangan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. (Supriatna, 2010:1).

Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SMA Islam Hidayatullah Semarang antara lain ialah Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Komputer, Palang Merah Remaja, Karya Ilmiah Remaja, Basket, Bela Diri, Seni Musik, Kepanduan, Sinematografi, Paskibra, Pramuka. Dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut diharapkan siswa dapat menyalurkan hobi dan kesukaan pada suatu kegiatan yang nantinya akan membentuk karakter siswa yang baik dan bermanfaat. Dalam kegiatan ekstrakurikuler Paskibra dan Pramuka, siswa dapat menyalurkan kecintaannya pada bangsa dan negara yang diimplementasi pada kegiatan pengibaran bendera nasional dan mampu belajar hidup bersosialisasi dan mandiri dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, SMA Islam Hidayatullah juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam, yang bertujuan membentuk karakter siswa sebagai siswa yang memiliki keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT. Dalam ekstrakurikuler dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter bangsa khususnya pada generasi muda, salah satunya adalah kegiatan Pramuka. Kegiatan Pramuka juga bertujuan sebagai kegiatan yang dapat membentuk karakter siswa menjadi siswa yang berbudi luhur. Hal ini karena di dalam kegiatan Pramuka terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan rasa cinta tanah air. Selain itu dalam kegiatan ini mampu menumbuhkan rasa memiliki, saling tolong menolong dan mencintai alam².

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan Pramuka juga terdapat pendidikan politik di dalamnya. Hal ini karena didalam kegiatan pramuka terdapat ketua dan wakil ketua regu, dimana ketua regu harus mampu mengakomodasi dan mengkoordinasikan anggotanya sebagai salah satu cara untuk mengasah bakat kepemimpinan siswa, sehingga regu yang dipimpinya dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

² Wawancara dengan Bapak Setya, Sabtu, 16 Agustus 2014 pukul 14.00 WIB

Selain kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat dapat menyalurkan bakat dan keahliannya pada bidang organisasi. Organisasi yang dimiliki SMA Islam Hidayatullah ada dua buah yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dan MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas). Kedua Organisasi ini merupakan lembaga aspirasi siswa, dengan OSIS sebagai pelaksana aspirasi siswa melalui proker (program kerja) yang mereka miliki dan MPK sebagai organisasi pengawasnya³.

Dalam organisasi ini juga terkandung pembelajaran politik dimana dalam organisasi ini seperti sebuah lembaga yang menyerupai legislatif dan eksekutif, dimana lingkungannya lebih kecil dan masa jabatan yang hanya setahun, yang akhirnya satu tahun yang diadakan sidang pertanggung jawaban. Sidang ini lebih sebagai sarana evaluasi MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) terhadap kinerja OSIS.

Selain itu kegiatan OSIS mampu membentuk karakter siswa, dimana OSIS dapat menjadi motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan, semangat para siswa untuk berbuat, dan pendorong kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para pembina dan pengurus mampu membawa OSIS selalu memenuhi kebutuhan yang diharapkan, yaitu menghadapi perubahan, memiliki daya tangkal terhadap ancaman, memanfaatkan peluang dan perubahan, dan yang terpenting memberikan kepuasan kepada anggota.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas data-data yang peneliti peroleh dalam penelitian tentang Peran Sekolah Dalam Pendidikan Politik Bagi Siswa Di Sekolah Menengah Atas Islam Hidayatullah Semarang.

1. Pendidikan politik di sekolah yang berbasis keagamaan seperti SMA Islam Hidayatullah Semarang lebih banyak dilakukan dengan cara pembinaan karakter/akhlak yang didukung dengan pengayaan praktik beragama seperti sholat berjamaah, dzikir bersama, *mentoring*, dan mengaji. Pembentukan karakter ini berguna apabila kelak mereka menjadi pemimpin ataupun dalam bermasyarakat dapat menjadi orang dengan karakter yang baik, santun, dan amanah.

³ Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Islam Hidayatullah Semarang, Bapak Aminuddin 13 Agustus 2014

2. Muatan pendidikan politik diantaranya terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Sosiologi, Sejarah, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Agama Islam
3. Pendidikan politik juga dapat dipelajari dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler sebagai sarana praktis mengasah bakat kepemimpinan dan rasa tanggungjawab siswa.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model pendidikan politik yang diajarkan pada sekolah SMA Islam Hidayatullah, berikut ini penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mendukung ketepatan model pendidikan politik di sekolah di masa mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pendidikan politik di sekolah, guru memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang politik. Oleh karena itu guru harus dapat memfasilitasi kegiatan siswa untuk diskusi, bermain peran, mendemonstrasikan pelaksanaan pemilu, debat politik dan sebagainya agar pembelajaran menjadi menarik, kreatif, inovatif dan efektif.
2. Berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, perlu didukung oleh penggunaan strategi yang relevan dengan situasi dan kondisi sekolah serta perkembangan peserta didik. Pemilihan dan penggunaan suatu strategi pembinaan ini bertujuan agar siswa dapat diarahkan dengan baik sesuai dengan minat dan kesukaannya. Sehingga dengan memilih kegiatan ekstrakurikuler yang tepat siswa dapat meningkatkan kemampuannya pada kegiatan-kegiatan di luar mata pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2008. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Almond, Gabriel A. 1963. *Budaya Politik (The Civic Culture)*. The Princeton University Press
- Moleong, Lexy J., DR., MA. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Monografi SMA Islam Hidayatullah Semarang, 2013-2014
- Purwanto M, Ngalim. 1991. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya